



Analisis Partisipasi Pemilih Pemula dalam Melaksanakan Pemilihan Umum Bupati Kerinci di Desa Agung Koto Iman

Nora Aprianti

UPI "YPTK" Padang

Email: nora.apria01@gmail.com

Abstract

Beginner voters are subject and object in political activity, in political activity including the existence of election activity of regional head. Beginner voters as objects in political activity, those who still need guidance in orientation toward the growth of potential and future ability can play a role in the political field. Likewise, the participation of novice voters, especially in agung koto iman village in the general election of bupati in need of political education in order to participate well. The purpose of this study is to find out how the participation of novice voters in the village of Agung Koto Iman in the selection of Regent Kerinci. This research is descriptive qualitative which will describe the participation of newbie voters in the village of Agung koto iman. In this research, the sample consists of 3 people whose sampling technique snowball sampling technique.

Keywords: Beginner Voters, Participation

Abstrak

Pemilih pemula merupakan subjek dan objek dalam kegiatan politik, dalam kegiatan politik termasuk di dalamnya adanya kegiatan pemilihan umum kepala daerah. Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi ke arah pertumbuhan potensi dan kemampuan ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Begitu juga partisipasi pemilih pemula khususnya di desa agung koto iman dalam pemilihan bupati Kerinci membutuhkan pendidikan politik agar dapat berpartisipasi dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi pemilih pemula di desa agung koto iman dalam pemilihan Bupati kerinci. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mana nantinya akan menggambarkan tentang partisipasi pemilih pemula di desa gung koto iman. Dalam penelitian ini sampel nya terdiri dari 3 orang yang mana teknik pengambilan sampel nya menggunakan teknik *Snowball sampling*.

Kata Kunci: Partisipasi, Pemilih Pemula

PENDAHULUAN

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara termasuk Indonesia. Melalui Pilkada memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan di cita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Pemilihan kepala daerah merupakan langkah awal terbentuknya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, memiliki kebebasan berekspresi dan berkehendak, dan mendapatkan akses terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara.

Masyarakat adalah komponen penentu berhasil atau tidaknya pelaksanaan Pilkada karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilihan masyarakatlah yang bisa menentukan nasib negara dan bangsa kedepan. Setiap warga negara, apapun latarbelakang nya seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, dan golongan mereka memiliki hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyatakan pendapat, menyikapi secara kritis kebijakan pemerintah dan pejabat negara. Hak ini disebut hak politik yang secara luas dapat langsung diaplikasikan secara kongkrit melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat Pilkada itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Kesadaran warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyak nya para pemilih yang tidak memberikan suaranya. sebagai fenomena penggambaran di atas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis. Menurut UU No 7 tahun 2017, pemilih adalah warga negara Indonesia yang genap berumur 17 tahun atau lebih/ sudah kawin, kemudian pasal 199 UU No.7 tahun 2017 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar oleh penyelenggara Pilkada dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara Pilkada dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti Pilkada (memberikan suara) pertama kali sejak Pilkada diselenggarakan di Indonesia, layaknya sebagai pemilih pemula mereka tidak memiliki pengalaman voting pada pemilu sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan politik.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pemilih pemula merupakan subjek dalam kegiatan politik, dalam kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi ke arah pertumbuhan potensi dan kemampuannya kedepan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum. Golput merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan dan kelangsungan bangsa dan negara dengan demikian meskipun hanya pemula, tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan di Indonesia kedepan.

Dalam konteks tersebut pemilih pemula perlu mengerti apa makna demokrasi dalam sebuah negara dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan dalam kegiatan yang berguna bagi negara. Dengan begitu mereka memposisikan sebagai warganegara yang mempunyai kewajiban untuk menggunakan haknya sebagai warganegara. Dalam upaya itu, mereka memerlukan pendidikan politik untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik karena pada dasarnya pemilih pemula sangat minim sekali pengalaman mereka dalam dunia politik.

Desa Agung Koto Iman merupakan sebuah desa yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan kegiatan Pilkada secara serentak dengan daerah-daerah lain sesuai Undang-Undang demi mensukseskan demokrasi di negeri ini. Berkenaan dengan hal tersebut penulis melakukan survei awal penulis menemukan partisipasi politik pemilih pemula di desa agung koto iman. Dimana hal ini penulis sampaikan bahwa terdapat beberapa fenomena (1). Adanya sebagian kelompok remaja di desa agung koto iman dalam kehidupan politik mereka hanya sekedar ikut-ikutan, dimana kelompok remaja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor; seperti ikut-ikutan kawan, pengaruh keluarga, serta adanya pengaruh dan iming-iming serta imbalan tertentu dari oknum-oknum berupa uang dan barang kebutuhan lainnya menjelang Pemilihan Umum berlangsung, dimana hal tersebut hanya diberikan pada waktu menjelang penyelenggaraan pemilihan umum. (2). Adanya beberapa kelompok remaja lainnya yang beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik tidak terlalu penting, karena berpartisipasi politik dalam kehidupan politik tidak akan mempengaruhi proses politik, sehingga tidak ada dorongan untuk berpartisipasi dalam kehidupan. Dari latar fenomena tersebut penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Partisipasi Pemilih Pemula dalam Melaksanakan Pemilihan Umum Bupati Kerinci di Desa Agung Koto Iman.

TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini disajikan pendapat beberapa sarjana yang melopori studi partisipasi dengan parai poliik sebagai pelaku utama.

Partisipasi politik yang disampaikan oleh Silvia Bolgherini. Menurut Bolgherini, partisipasi politik " ... *a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious*. Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.

Studi klasik mengenai partisipasi politik diadakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam karya penelitiannya *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Lewat penelitian mereka, Huntington dan Nelson memberikan suatu catatan: Partisipasi yang bersifat *mobilized* (dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bolgherini yaitu bahwa dalam melakukan partisipasi politik, cara yang digunakan salah satunya yang bersifat paksaan (*contentious*). Bagi Huntington and Nelson, perbedaan partisipasi politik sukarela dan mobilisasi (diarahkan, senada dengan dipaksa) hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan: Intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warganegara tetap melakukan partisipasi politik.

Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warganegaranya. Pola partisipasi politik di negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal tentu berbeda dengan di negara dengan sistem Komunis atau Otoritarian. Bahkan, di negara-negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal juga terdapat perbedaan, seperti yang ditunjukkan Oscar Garcia Luengo, dalam penelitiannya mengenai *E-Activism: New Media and Political Participation in Europe*. Warganegara di negara-negara Eropa Utara (Swedia, Swiss, Denmark) cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi politiknya ketimbang negara-negara Eropa bagian selatan (Spanyol, Italia, Portugal, dan Yunani).

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan.

Pemilih Pemula

Pemilih di Indonesia dibagi tiga kategori. Pertama, pemilih yang rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih edialis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Menurut UU No 7 tahun 2017, pemilih adalah warga negara Indonesia yang genap berumur 17 tahun atau lebih/ sudah kawin, kemudian pasal 199 UU No.7 tahun 2017 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar oleh penyelenggara Pilkada dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara Pilkada dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti Pilkada (memberikan suara) pertama kali sejak Pemilu diselenggarakan di Indonesia dengan rentan usia 17-21 tahun.

Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang masih berstatus pelajar, mahasiswa, serta kerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan binaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ketingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah (Drs.S.Margono) prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau realita dilapangan dengan mengumpulkan data secara langsung dilapangan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik snowball sampling. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama dan mendapatkan sampel berikutnya, demikian secara terus menerus hingga seluruh kebutuhan sampel penelitian terpenuhi. Ada pun kriteria informannya: pemilih pemula yang berusia 17-18 tahun, baru pertama ikut pemilihan, terdaftar pada daftar pemilih tetap, dan berada di Desa Agung Koto Iman pada saat pemilihan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membangun kesadaran politik bagi remaja di Indonesia sulit bilamana lembaga-lembaga politik tidak peduli dengan realitas tersebut. Ketika beberapa lembaga politik hanya mengharapkan kemenangan dalam bursa Pilkada, remaja tidak akan pernah tertarik mempelajari politik. Faktor terbesar yang mempengaruhi pembentukan kesadaran remaja dalam politik termasuk partisipasi politik tergantung orang tua, terlebih lagi hal ini lembaga-lembaga politik seperti partai, sekolah dan lingkungan. Bila tidak ada yang mengarahkan, maka mereka tidak akan pernah memiliki kepedulian untuk berpartisipasi. Untuk melihat partisipasi pemilih pemula dapat dilihat melalui dimensi:

Kesadaran politik

Kesadaran politik merupakan suatu sikap penghayatan atau pemilikan seseorang terhadap nilai-nilai sebagai warga negara dalam menunaikan hak dan kewajibannya untuk menunjang dan berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kesadaran Politik adalah sebuah kesadaran yang harus dimiliki oleh warga negara tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara bagaimana bisa menyikapi masalah politik yang ada dilingkup kebijakan Negara dan Pemerintah. Sedangkan sosialisasi politik adalah proses bagaimana orang bisa mengenal atau mengetahui atau bisa tanggap dengan sistem politik yang ada serta punya reaksi terhadap adanya gejala-gejala politik. Dengan adanya kesadaran politik yang ada pada diri masyarakat secara otomatis akan mendukung sekali proses adanya sosialisasi kesadaran politik. Karena dengan adanya sosialisasi politik yang dilakukan, maka kita sebagai warga negara atau sebagai individu tentunya minimal akan paham mengenai masalah-masalah atau isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu maka akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik. Kesadaran politik dapat dilihat dari dua indikator yaitu Keaktifan pemilih pemula, dan adanya sikap antusias.

1. Keaktifan pemilih pemula

Menurut Ramlan (2002) keaktifan pemilih pemula di dorong oleh sikap orienasi yang begitu tinggi. di samping itu pula kesadaran dan motivasi pemilih pemula dalam kegiatan politik untuk menopang tingkat partisipasi. Sedangkan penyebab ketidak aktifan pemilih pemula dalam politik adalah kurangnya pengetahuan pemilih pemula terhadap Pilkada itu sendiri.

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Roni hendriko (18 tahun) mahasiswa sebagai berikut :

“Tidak, karena masih kecil jadi saya belum paham tentang Pilkada, jadi belum berani untuk ikut aktif dalam kegiatan Pilkada”

Hal lain juga di sampaikan oleh Nur aida (17 Tahun) pelajar sebagai berikut:

“tidak, karena tidak berani ikut aktif dalam kegiatan Pilkada karena belum terlalu paham apa itu Pilkada, lagian masih sekolah juga jadi tidak terlalu tertarik ikut aktif”

Sama juga yang di sampaikan Ayu nurliana (18 Tahun) mahasisiwa:

“tidak, karena saya tidak paham bagai mana Pilkada,dan juga saya tidak di izinkan orang tua untuk ikut aktif”

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh informan diatas dapat di simpulkan bahwa pemilih pemula di desa agung koto iman masih belum aktif dalam mengikuti kegiatan politik. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti salah satunya adalah kurangnya pengetahuan pemilih pemula terhadap Pilkada itu sendiri. Disini juga dituntut peran aktif dari KPU sendiri untuk dapat mensosialisasikannya kepada para pemilih pemula tersebut. sehingga tercapai pemilihan yang demokratis dan objektif. Selain itu disini juga diminta keaktifan para pemilih pemula untuk dapat mencermati situasi dan dapat menambah pengetahuan mereka sendiri terhadap Pilkada sehingga mereka sendiri tidak kecewa. Dalam hal ini pemilih pemula memang harus disiapkan untuk menjadi pemilih yang cerdas sehingga tidak bisa jatuh dalam eksploitasi politik. Saat dilakukan observasi di desa agung koto iman, maka diketahui bahwa sebagian besar pemilih pemula memilih untuk tidak terlalu memikirkan dampak ketika mereka salah memilih calon hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan mereka terhadap Pilkada, dan tujuan dari Pilkada itu sendiri.

2. Sikap antusias dari pemilih pemula

Dengan adanya sikap antusias dari pemilih pemula dalam kesadaran politik tentu membawa pada konsekuensi pada tatanan politik yang stabil, karena dengan kesadaran dan pemahaman politik merupakan penunjang dalam mewujudkan satbilitas politik. Pemilih pemula dengan kesadaran dan pemahaman politik sikap dan perilaku masyarakat secara partisipasi dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Roni hendriko (18 tahun) mahasiswa sebagai berikut:

“ya saya antusias mengikuti Pilkada tapi saya tidak terlalu paham dengan Pilkada”

Hal lain juga di sampaikan oleh Nur aida (17 Tahun) pelajar sebagai berikut

“ya antusias karena ini baru pertama kali saya ikut Pilkada, api kalo masalah Pilkada saya tidak erlalu paham”

Sama juga yang di sampaikan Ayu nurliana (18 Tahun) mahasisiwa:

“ya, saya antusias karena ini baru pertama kali saya ikut Pilkada api kalo memahami Pilkada ya saya kurang paham karena saya pemula”

Dari hasil Wawancara dilakukan kepada informan Pemilih Pemula memang masih belum memiliki kesadaran untuk memahami artinya Pilkada. Hal ini dianggap wajar karena pemilih pemula biasanya baru pertama kali ikut dalam pesta demokrasi. Tidak jarang mereka hanya menjalankan kewajiban saja tanpa memikirkan calon yang mana yang mungkin saja bisa merubah dan membangun lebih baik lagi. Untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sangat dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak seperti masyarakat, orang tua, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkatnya KPU). Selain tugas pemerintah, KPU juga memiliki tugas dalam membangun kesadaran politik pemilih

pemula. Salah satu tugas KPU adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih pemula supaya mereka paham dengan politik dan mengerti soal pentingnya berpartisipasi aktif dalam Pilkada. Dengan harapan menghasilkan pemilih Pilkada cerdas. Selain itu, harus diadakannya program sosialisai dan pendidikan politik kepada pemilih pemula perlu terus di tingkatkan intensitasnya supaya masyarakat lebih cerdas di dalam menjatuhkan pilihannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan seluruh informan maka dapat dianalisa bahwa masih kurangnya kesadaran pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah. Dan hal ini harus segera diantisipasi agar tidak terulang kembali di pemilihan berikutnya. Pemilih pemula harus memiliki kesadaran terhadap keadaan politik yang ada disekitarnya. Dengan kesadaran politik yang tinggi para pemilih pemula diharapkan akan memperhatikan program dan melakukan penilaian yang kritis terhadap kompetisi masing-masing calon bupati.

Kepercayaan terhadap pemerintah

Merupakan suatu sikap seseorang untuk mempercayai pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diwakili oleh pejabat-pejabat pemerintah khususnya jabatan politis. Dalam hal adalah sikap pemilih pemula dalam mempercayai pimpinan pilihannya dalam menjalankan tugas sebagai Bupati. Sikap kepercayaan ini akan mempengaruhi pemilih pemula untuk berpartisipasi. Karena jika mereka tidak memiliki sikap percaya maka juga akan enggan berpartisipasi dalam Pilkada. Untuk mengetahui sejauh mana kepercayaan pemilih pemula dalam mempercayai pemerintah dalam hal ini adalah calon Bupati.

Dalam pemilihan umum selalu ada kampanye yang mengumbar banyak janji politik. Visi misi, dan segala sesuatu yang dapat menarik pemilih agar mempercayainya untuk duduk memimpin. Hanya saja pemilih sekarang lebih hati-hati dengan banyaknya janji yang diumbar oleh calon bupati. Seperti hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Roni hendriko (18 tahun) mahasiswa sebagai berikut:

“tidak terlalu percaya dengan janji dari para calon, karena seperti yang saya dengar terjadi pada bupati sebelum nya banyak janji mereka pada saat kampanye tidak dilaksanakan”

Hal lain juga di sampaikan oleh Nur aida (17 Tahun) pelajar sebagai berikut

“tidak, mereka hanya berjanji saat kampanye tapi tidak dilaksanakan saat menjabat”

Sama juga yang di sampaikan Ayu nurliana (18 Tahun) mahasisiwa:

“saya idak percaya dengan janji para calon karena jika sudah terpilih biasanya bupati akan lupa dengan janji politik yang diusungnya saat kampanye”

Dari hasil wawancara dengan informan di atas dapat di simpulkan bahwa pemilih pemula kurang percaya terhadap pemerintah, ini di akibatkan karena pemilih pemula mendengar dari cerita pengalaman masyarakat sebelumnya banyak janji calon bupati tidak terlaksana, Hal ini menjadi salah satu faktor merosotnya kepercayaan masyarakat khususnya pemilih pemula untuk kembali memilih calon Bupati sehingga pemilih pemula lebih memilih tidak ikut berpartisipasi. Dikarenakan adanya faktor ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam hal ini khususnya Bupati. Begitu banyak berita yang berkembang menjadi alasan mengapa pemilih pemula tidak antusias terhadap adanya Pilkada.

Keikutsertaan dalam kehidupan politik

Merupakan suatu sikap mensukseskan kehidupan politik melalui kegiatan-kegiatan politik serta program-program pemerintah yang diselenggarakan untuk menunjang dan memberikan pengetahuan politik / pendidikan politik kepada masyarakat. Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

1. Memberikan hak suara ke tempat pemungutan suara

Yang dimaksud dengan pemberian suara adalah ikut datang dan mendaftarkan diri ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta melakukan pilihan (mencoblos) kandidat calon Bupati dan wakil bupati. Dari data yang didapatkan mengenai pemberian hak suara pemilih pemula di desa agung sudah memenuhi target.

Seperti di ketahui dari hasil wawancara sebagai berikut:

Roni hendriko (18 tahun) mahasiswa sebagai berikut:

“ya saya ikut menyoblos, untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara”

Juga di sampaikan oleh Nur aida (17 Tahun) pelajar sebagai berikut:

“iya saya memberikan suara, karena untuk merasakan bagaimana rasanya ikut memilih”

Sama juga yang di sampaikan Ayu nurliana (18 Tahun) mahasisiwa:

“iya, karena saya terdaftar di dalam DPT”

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa dalam memberikan hak suaranya pemilih pemula sudah melakukannya dengan baik hanya saja yang terjadi adalah kesalahan pemasukan data sehingga masih ada pemilih pemula yang tidak dapat memberikan hak suaranya karena tidak terdaftar dan tidak memiliki kartu pemilih. Pemilih yang baru terlibat dalam kegiatan pemilihan digolongkan dalam pemilih pemula. Faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut bisa dari dalam diri individu itu sendiri seperti adanya kesadaran yang dimiliki pemilih pemula maupun faktor pendorong lainnya yaitu dukungan dari berbagai pihak seperti dorongan dari keluarga, teman-teman sebaya yang dilakukan melalui komunikasi politik dalam kehidupan sehari-hari.

2. Melakukan kampanye

Setiap kali pesta demokrasi digelar, baik dalam bentuk pemilihan umum tingkat nasional (Pemilu) ataupun tingkat daerah (Pilkada) selalu menghadirkan kelompok pemilih pemula pada setiap periode pelaksanaannya, selain itu kelompok tersebut selalu berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk, dengan kriteria usia 17 tahun ke atas atau telah menikah pada saat pemilu digelar maka kelompok ini dikategorikan sebagai pemilih pemula.

Dengan bekal pengalaman pertama yang dimiliki oleh pemilih pemula maka tidak jarang kelompok ini memberikan prospek yang menjanjikan untuk dipegaruhi oleh calon bupati tertentu guna mendulang suara lebih untuk memenangkan Pilkada. Berdasarkan wawancara, Roni hendriko (18 tahun) mahasiswa sebagai berikut:

“saya ikut menghadiri kampanye, alasannya karena mau melihat artis ibu kota”

Juga di sampaikan oleh Nur aida (17 Tahun) pelajar sebagai berikut:

“iya saya ikut kampanye, karena pada saat kampanye banyak hiburan”

Sama juga yang di sampaikan Ayu nurliana (18 Tahun) mahasisiwa:

“iya, karena semua orang pergi kampanye jadi saya ikut juga”

Dari hasil wawancara yang dilakukan kembali dapat dianalisa bahwa sudah banyak pemilih pemula di desa agung yang berpartisipasi dalam kampanye. Bagi sebagian pemilih

faktor yang menentukan pilihan mereka biasanya menentukan pilihan politik sebagaimana yang dipilih oleh kelompok teman sebaya mereka. Selain faktor trend politik, pemilih pemula biasanya menggunakan hak pilih sebagaimana pilihan orang tua mereka. Begitu juga dengan keikutsertaan mereka dalam kampanye yang memiliki banyak motif seperti teman, iming-iming janji politik serta memang berdasarkan dari hati nurani. Apapun faktornya pemilih pemula hendaknya memahami terlebih dahulu. Apa itu Pilkada dan tujuannya serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berkampanye.

3. Ikut serta dalam pengurus partai dan tim sukses

Yang dimaksud dengan ikut serta dalam kepengurusan partai politik dan tim sukses adalah berpartisipasi pemilih pemula sebagai kader partai atau tim sukses pasangan calon bupati sebagai upaya mensukseskan pemilihan kepala daerah.

Seperti hasil wawancara informan sebagai berikut :

Roni hendriko (18 tahun) mahasiswa sebagai berikut

“saya tidak ikut menjadi pengurus partai dan tim sukses, alasannya karena saya masih sibuk dengan urusan kuliah jadi tidak sempat menjadi tim sukses, lagian saya tidak terlalu paham masalah Pilkada atau pilkada”

Sama juga yang di sampaikan Ayu nurliana (18 Tahun) mahasisiwa:

“Tidak, karena saya belum berani terlibat dalam tim sukses”

Juga di sampaikan oleh Nur aida (17 Tahun) pelajar sebagai berikut:

“tidak, karena saya sibuk sekolah dan juga belum diizinkan orang tua untuk ikut dalam politik”

Dari hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa di Desa Agung Koto iman pemilih pemula tidak ikut berpartisipasi dalam kepengurusan partai politik. Memang jika dilihat pada kenyataannya. Partai politik (parpol) sebagai salah satu sarana pendidikan politik masyarakat perlu pintar-pintar mencari cara untuk meraih partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan termasuk kalangan remaja yang menjadi pemilih pemula. Partai Politik seharusnya merangkul pemilih pemula dalam Pilkada dan tidak perlu terlalu menintervensi untuk masuk kedalam kepengurusan. Ada baiknya Partai Politik membuat perencanaan kegiatan untuk para pemilih pemula dalam sembilan langkah kemenangannya. Melalui kesadaran tentang karakter pemilih pemula yang santai dan menyenangkan, dan masuk ke basis-basis pemilih pemula melalui kegiatan yang betul-betul diminati oleh pemilih pemula. Hal ini rasanya lebih efektif daripada memaksakan mereka untuk ikut serta dalam kepengurusan partai politik.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa: pemilih pemula di Desa Agung masih kurang berpartisipasi dalam pemilihan Bupati. Hal ini dilihat dari pemilih pemula masih kurang aktif berpartisipasi, hal ini dikarenakan para pemilih pemula tidak aktif untuk dapat mencermati situasi dan dapat menambah pengetahuan mereka sendiri terhadap Pilkada sehingga mereka sendiri tidak kecewa. Dalam hal ini pemilih pemula memang harus disiapkan untuk menjadi pemilih yang cerdas sehingga tidak bisa jatuh dalam eksploitasi politik. Selain itu, sebagian besar pemilih pemula memilih untuk tidak terlalu memikirkan dampak ketika mereka salah memilih calon hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan, dan tujuan dari Pilkada itu sendiri. Terakhir kurangnya kesadaran pemilih pemula untuk ikut dalam Pilkada. Mereka hanya ikut-ikutan bukan melakukannya dengan sepenuh hati dan tanpa tujuan. Masih kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah sehingga mengakibatkan kurangnya keinginan untuk ikut berpartisipasi.

Sebagai saran untuk penelitian ini seharusnya diberikan sosialisasi kepada pemilih pemula tentang Pilkada seperti tata cara, syarat serta tujuan dari Pilkada itu sendiri. Ditambah perlu dilakukan dialog timbal balik antara pemilih pemula dengan penyelenggara untuk menjawab berbagai hal yang belum diketahui pemilih pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- Banga, Wempi. 2007. *Kajian Administrasi Publik Kontemporer*. Kendari : Unhalu Press
- Budiharjo. Mariam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Hasan, Ikhbal. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Margono.2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka cipta
- Mas'ood Mochtar, Colin Mac Andrew. 2011. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

- Moleong Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Rahardiansyah trubus. 2012. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta : Universitas Trisakti
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*, Bandung : Grasindo